

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 9 No. 1 April 2016 Hal. 1 - 112

DIVERGENSI TAFSIR



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Dra. Titik A. Winahyu (Komunikasi)

Penyunting:

1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Dinal Fedrian, S.IP. (Ilmu Pemerintahan)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)

Mitra Bestari:

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)
6. Mohamad Nasir, S.H., M.H. (Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)
8. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Hukum Internasional)

9. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)
10. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)
11. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)
12. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Hukum Perdata/Hukum Agraria)

Sekretariat:

1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.
2. Yuni Yulianita, S.S.
3. Noercholysh, S.H.
4. Wirawan Negoro, A.Md.
5. Didik Prayitno, A.Md.
6. Eka Desmi Hayati, A.Md.
7. Emy Nur'aini, S.H.

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

E-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.komisiyudisial.go.id

DIVERGENSI TAFSIR

Suatu ketika, di sebuah sidang praperadilan, seorang guru besar filsafat hukum ditanya tentang hakikat suatu tafsir. Pertanyaannya sederhana, yakni apakah hukum acara terbuka untuk ditafsirkan. Sang guru besar yang paham dengan pemikiran hermeneutika lalu menjawab dengan sedikit panjang lebar, yang pada intinya menegaskan bahwa semua bentuk upaya pemahaman adalah penafsiran juga.

Pada saat seseorang membaca rumusan pasal dalam undang-undang, terlepas apakah undang-undang itu berada di ranah hukum material atau formal, si pembaca pasti melakukan tafsir. Paling tidak ia memahami pasal itu berangkat dari struktur kalimat dalam tata bahasa Indonesia. Artinya, di sana sudah terjadi penafsiran, minimal penafsiran gramatikal.

Paul Ricoeur pernah menyatakan bahwa penulis suatu teks sesungguhnya adalah pembaca pertama dari teks yang dibuatnya sendiri. Apabila suatu pasal dibuat oleh para pembentuk undang-undang, maka merekalah pembaca, dalam hal ini dapat dimaknai sebagai penafsir pertama, dari produk hukum itu. Tatkala produk hukum itu tersebar ke masyarakat, sesungguhnya tidak lagi ada otoritas mutlak untuk memaksakan masyarakat mengikuti suatu tafsir monolitik sebagaimana dikehendaki pembentuk undang-undang pada saat aturan itu dibuat.

Itulah sebabnya, misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat saja pasal-pasal yang secara legal formal masih mengikat, sebenarnya tidak lagi mendapat pengakuan sosiologis. Pasal-pasal itu secara diam-diam mengalami divergensi makna, yang semula dianggap tindak pidana, kemudian menghadapi pergeseran makna, bahkan sampai menjurus ke dekriminalisasi dan depenalisasi. Akibatnya, maknanya menjadi multitafsir, bergerak menyebar dari satu titik ke berbagai jurusan pemaknaan.

Dalam edisi Jurnal Yudisial kali ini, sejumlah tulisan memperagakan persoalan divergensi tafsir. Tulisan pertama menyinggung tentang ketidakcermatan hakim yang berujung pada lahirnya disparitas putusan. Titik perhatian dalam tulisan ini adalah “ketidakcermatan” yang memperlihatkan faktor subjektif demikian berperan dalam melahirkan tafsir hukum dalam produk putusan pengadilan. Demikian juga dengan tulisan lain tentang konsep “mahar” dan “ahli waris” dalam tulisan-tulisan berikutnya.

Sejumlah tulisan lain, sekalipun tidak secara eksplisit tercermin dari judul artikel, sesungguhnya bergerak dalam problematika divergensi tafsir, misalnya tentang pemaknaan keadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan, dalam hukum pembuktian, dan dalam kasus korupsi. Artikel lain bercerita tentang pengujian undang-undang dan kewenangan Komisi Yudisial menurut kacamata Mahkamah Konstitusi.

Alhasil, seperti biasanya, edisi jurnal kali ini tetap memberikan nuansa menarik dalam eksaminasi putusan-putusan pengadilan. Para penulis yang datang dari berbagai institusi secara sadar ingin menawarkan cara pandang tersendiri terkait putusan-putusan yang telah ditetapkan. Dan, sebagai pembaca putusan, tentu merekapun berhak untuk memberikan tafsir atas teks putusan-putusan tersebut.

Selamat membaca! Terima kasih.

Tertanda
Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

KETIDAKCERMATAN HAKIM**BERUJUNG PADA DISPARITAS PUTUSAN 1 - 18**

Kajian Atas Berbagai Putusan Pengadilan

Terkait Permohonan Pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara

Loura Hardjaloka

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH**DAN PERUNDANG-UNDANGAN 19 - 35**

Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012

Harijah Damis

Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Makassar

PENAFSIRAN HUKUM YANG MEMBENTUK**KEADILAN LEGAL DALAM PENYELESAIAN****SENKETA PERBANKAN SYARIAH 37 - 50**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Iskandar Muda

Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Bandar Lampung

MAKNA “AHLI WARIS” SEBAGAI**SUBJEK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI 51 - 71**

Kajian Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012

Ramiyanto

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang

URGENSI BEDAH MAYAT FORENSIK**DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA****PEMBUNUHAN BERENCANA 73 - 92**

Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR

Y. A. Triana Ohoiwutun

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember

MENYOAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT IM2

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 93 - 112

Kajian Putusan Nomor 787 K/PID.SUS/2014

Vidya Prahassacitta

Fakultas Humaniora Jurusan Business Law Universitas Bina Nusantara, Jakarta

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 9 No. 1 April 2016

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 347.962

Hardjaloka L (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok)

Ketidackermatan Hakim Berujung pada Disparitas Putusan

Kajian Atas Berbagai Putusan Pengadilan Terkait Permohonan Pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara

Jurnal Yudisial 2016 9(1), 1-18

Hakim yang memeriksa kasus kepailitan atas empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk persero diharapkan dapat memutuskan secara tepat. Namun, muncul disparitas putusan karena ketidackermatan hakim dan hal tersebut menarik untuk lebih ditelusuri. Melalui penelitian yuridis normatif ini, ketidackermatan hakim terlihat saat menyatakan bahwa BUMN tidak dapat dipailitkan selain oleh Menteri Keuangan karena menganggap persero termasuk dalam kategori “tidak terbagi atas saham” yang pada dasarnya merujuk pada perum, sehingga persero yang pada dasarnya memiliki modal yang “terbagi atas saham” dapat dipailitkan oleh kreditornya. Ketidackermatan hakim lainnya ialah tidak dapat dilakukan sita umum atas BUMN karena merupakan kekayaan negara, padahal menurut Fatwa Mahkamah Agung bahwa kekayaan negara dalam BUMN merupakan kekayaan terpisah dan telah menjadi harta BUMN. Hakim pun tidak cermat dalam memperhatikan fakta di persidangan dalam salah satu kasus dengan menyatakan bahwa perseroan tidak terbagi atas saham dan bertujuan untuk kepentingan publik padahal dalam anggaran dasar perseroan tersebut telah disebutkan bahwa perseroan terbagi atas saham dan memiliki tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, disparitas putusan terjadi karena hakim banyak melakukan kekeliruan dalam: (i) menganalisis ketentuan

terkait kepailitan terhadap BUMN; (ii) memahami hak dalam memohon pailit terhadap persero; dan (iii) dalam memeriksa fakta yang terungkap di persidangan.

(Loura Hardjaloka)

Kata kunci: badan usaha milik negara, kepailitan, kekayaan negara, disparitas putusan, sita umum.

UDC 348.97 (094.5)

Damis H (Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Makassar)

Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan

Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012

Jurnal Yudisial 2016 9(1), 19-35

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 23 K/AG/2012 yang mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER sangat menarik untuk dikaji karena berimplikasi pada tidak terpenuhinya salah satu hak perempuan pasca perceraian. ER mendapat perlawanan dari pihak ketiga dan pengajuan peninjauan kembali oleh turut termohon kasasi. Dasar pertimbangan majelis hakim kasasi dalam mengabulkan gugatan mahar perempuan ER dan membatalkan putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang menyatakan gugatan mahar penggugat tidak dapat diterima, menarik untuk dianalisis. Gugatan menjadi kompleks karena objek sengketa gugatan tercantum atas nama orang tua termohon kasasi (R), dan dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh orang tua termohon kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi. Adanya perlawanan pihak ketiga maupun peninjauan kembali oleh ayah kandung lelaki R, membuat kemenangan perempuan ER

menjadi hanya sesaat. Dikabulkannya tuntutan ayah kandung lelaki R pada tingkat peninjauan kembali berimplikasi kepada tidak terpenuhi hak perempuan pasca perceraian atau pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar dengan tetap berpedoman aturan berdasarkan fikih serta adanya pengakuan sosial (dalam masyarakat) bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas dalam akad nikah. (Harijah Damis) Kata kunci: hak perempuan, mahar, fikih, perceraian.	PUU-X/2012 akhirnya membentuk keadilan legal (<i>iustitia legalis</i>) yang menghasilkan penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama. Tulisan ini akan mencari untuk mengetahui metode penafsiran hukum apa yang digunakan dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. (Iskandar Muda) Kata kunci: keadilan legal, penyelesaian sengketa perbankan syariah, kekuatan hukum mengikat.
UDC 336.71: 297 Muda I (Fakultas Hukum, Universitas Malahayati, Bandar Lampung) Penafsiran Hukum yang Membentuk Keadilan Legal dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(1), 37-50 UU Perbankan Syariah merupakan aturan khusus tentang perbankan yang berprinsip syariah karena aturan hukum konvensional perbankan yang sudah ada belum mengatur secara khusus terkait perbankan syariah. Namun ada pihak yang melakukan uji konstitusionalitas berdasarkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Perbankan Syariah. Salah satu yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah adanya Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, sebagaimana diketahui dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut dimungkinkannya penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui proses peradilan umum. Pada akhirnya dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2013 menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusionalitas) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penafsiran hukum yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/	UDC 348.974.2 Ramiyanto (Fakultas Hukum, Universitas Sjahyakti Palembang, Palembang) Makna “Ahli Waris” sebagai Subjek Pengajuan Peninjauan Kembali Kajian Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012 <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(1), 51-71 Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia. Ahli waris merupakan salah satu pihak yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang rumusannya: “Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Merujuk pada ketentuan itu, maka PK merupakan upaya hukum yang disediakan untuk melawan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>) yang berisi pemidanaan. Ketentuan itu mempunyai keterbatasan karena tidak diberikan batasan pengertian mengenai makna “ahli waris” yang menimbulkan permasalahan di dalam penerapannya terkait dengan penafsiran maknanya. Permasalahan

itu timbul ketika majelis hakim Mahkamah Agung di dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012 menerima PK yang diajukan isteri terpidana (ST) dengan dikategorikan sebagai ahli waris. Permasalahannya adalah “Apakah isteri seorang terpidana yang masih hidup dapat dikategorikan sebagai ahli waris?” Tulisan ini akan menganalisis penafsiran hukum hakim agung untuk menerima PK yang diajukan oleh istri ST dikaitkan dengan ajaran dan doktrin yang masih berlaku saat ini. (Ramiyanto) Kata kunci: tafsir, ahli waris, peninjauan kembali.	merupakan fokus dari penelitian ini. Adapun metode penulisan berbasis pada penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian hukum kualitatif (<i>qualitative-legal research</i>). Dari aspek hukum pidana, pemeriksaan bedah mayat forensik bermanfaat untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. (Y. A. Triana Ohoiwutun) Kata kunci: pembunuhan berencana, bedah mayat forensik, <i>visum et repertum</i>, pertanggungjawaban pidana.
UDC 343.25 Ohoiwutun YAT (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember) Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(1), 73-92 Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap empat orang terdakwa. Tindak pidana pembunuhan sebagai delik materiil melarang akibat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sehingga haruslah dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan setiap terdakwa yang mengakibatkan kematian korban. Namun demikian, <i>visum et repertum</i> sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian korban, karena tidak dilakukan bedah mayat forensik. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibatnya di dalam delik materiil, dapat berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana. Bedah mayat forensik atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan syarat yang bersifat <i>conditio sine qua non</i>, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Posisi urgen bedah mayat forensik dalam pembuatan <i>visum et repertum</i>	UDC 343.352 Prahassacitta V (Fakultas Humaniora Jurusan Business Law, Universitas Bina Nusantara, Jakarta) Menyoal Pertanggungjawaban Pidana PT IM2 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 787 K/PID.SUS/2014 <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(1), 93-112 Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/PID.Sus/2014 merupakan putusan perkara tindak pidana korupsi yang menghukum PT IM2 dengan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan korporasi ini berawal dari perjanjian kerja sama antara PT IM2 dengan PT I dalam penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz secara melawan hukum. Menarik untuk meneliti mengenai bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara ini terutama dihubungkan dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Melalui penelitian normatif hukum dengan studi kepustakaan disimpulkan

bahwa doktrin identifikasi dipergunakan untuk mengidentifikasi kesalahan dari terdakwa kepada korporasi guna meminta pertanggungjawaban pidana baik pengurus maupun korporasi. Akan tetapi ditinjau dari penafsiran historis, penggunaan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidaklah tepat dalam perkara ini karena pasal tersebut merupakan delik propria khusus untuk pegawai negeri. Pada akhirnya pengungkapan perkara kejahatan korporasi guna meminta pertanggungjawaban pidana korporasi perlu didorong namun dengan memperhatikan penggunaan undang-undang yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

(Vidya Prahassacitta)

katakunci: kejahatankorporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, korupsi.

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 9 No. 1 April 2016

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC 347.962

Hardjaloka L (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok)

The Inaccuracy of Judges Led to Disparities in Court Decision

An Analysis of Various Court Decisions Regarding Petition in Bankruptcy to State Owned Enterprises (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2016 9(1), 1-18

Judges examining the cases of bankruptcy of four state-owned enterprises (SOEs) in the form of limited liability company (PT persero), are expected to rule the case truthfully. However, due to such an inaccuracy of the judges, there seems to be disparities in their decisions, which is interesting to further explore. In the analysis using normative juridical research, the judges look less scrupulous by stating that SOE cannot be bankrupted by other than the Minister of Finance, and considering that the company's capital is categorized as, "not divided into shares," referring principally to a corporation, thus a company which basically has a capital "divided into shares" could be bankrupted by the creditors. General confiscation on SOE cannot be performed because the object of confiscation is state assets, which is in contrast to Fatwa of the Supreme Court stating that the state asset in SOEs constitute its own separate assets and have become the property of SOE. This also underlines another inaccuracy of the judges in resolving this case. The judges did not wisely consider the facts in the trial in one case by stating that the company's capital is not divided into shares and aimed for public benefit, while in the articles of association it is specified that the capital is divided into shares with the motive of profit-seeking. And is therefore, disparities in court decisions occur because many judges make

mistakes in: (i) analyzing relevant provisions of bankruptcy for state enterprises; (ii) understanding the rights in companies filing for bankruptcy; and (iii) checking the facts revealed in the court.

(Loura Hardjaloka)

Keywords: state-owned enterprise, bankruptcy, state assets, decision disparity, general confiscation.

UDC 348.97 (094.5)

Damis H (Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Makassar)

Dowry Through the Perspective of Fiqh and Statutory Regulations

An Analysis of Court Decision Number 23 K/AG/2012 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2016 9(1), 19-35

The Supreme Court's Cassation Decision Number 23 K/AG/2012 granting approval to a woman's (named ER) lawsuit for a dowry is very interesting to examine because of its impact to the non-fulfillment of one of the rights of women after divorce. ER got resistance from the third party's claim and a judicial review by cassation's co-respondent. Basic consideration of Supreme Court Judges Council approved the lawsuit of ER and annulled the Religious Court Decision of First-Instance and Second-Instance, which affirmed the dowry lawsuit of the respondent unacceptable, is an interesting issue for discussion. The lawsuit becomes complicated, as the object of dispute is listed in the name of the parents of the co-respondent (R) and on the value of goods that R voluntarily donated, then handed over as dowry by the co-respondent. The resistance of the third party's claim or judicial review by the father of R makes the victory of ER only momentarily. The granting of the appeal filed

by the father, at the level of judicial review has implications for non-fulfillment of the rights of women after divorce or after the decision becomes legally binding. Thus it shall be necessary to set a specific regulation concerning dowry referring still to fiqh-based rules as well as the social recognition (in the community) that dowry is an inalienable right of women and not expressed as a mere formality in the wedding vows. (Harijah Damis) Keywords: woman right, dowry, the fiqh, divorce.	final point establishes legal justice (justitia legalis) which stipulates that the Islamic Banking dispute settlement must be decided in the religious court. This analysis is discussing what legal interpretation methods used in Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 stating the elucidation of Article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law is contrary to the 1945 Constitution, and not legally binding, thus establishing legal justice in Islamic Banking dispute settlement. (Iskandar Muda) Keywords: legal justice (justitia legalis), Islamic banking dispute settlement, legally binding.
UDC 336.71: 297 Muda I (Fakultas Hukum, Universitas Malahayati, Bandar Lampung) Legal Interpretation Enforcing Legal Justice/ Justitia Legalis in the Settlement of Islamic Banking Disputes An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 93/PUU-X/2012 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(1), 37-50 Islamic Banking Law regulates specifically on finance and banking with respect to the principles of Islamic Banking, for the reason that the applicable conventional banking law has not thoroughly set rules on Islamic Banking. On the other hand, there is a filing of a constitutional review for Decision Number 93/PUU-X/2012 to the Constitutional Court concerning Islamic Banking Law. One of the issues disputed by the Applicant is the Article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law, specifically in the elucidation stating that any dispute on Islamic Banking is possible to be resolved in the courts of general jurisdiction. At last on 29 August 2013, the case was openly heard at Plenary Session at the Constitutional Court, to issue that the elucidation of Article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law contradicts the 1945 Constitution (unconstitutionality) and has no binding legal force. Legal interpretation used in the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 as a	UDC 348.974.2 Ramiyanto (Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti Palembang, Palembang) Interpretation of Heir as a Subject of Filing a Petition for Judicial Review An Analysis of Court Decison Number 97 PK/Pid/Sus/2012 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(1), 51-71 Case review appeal is one of extraordinary legal remedies in the court proceeding of Procedural Criminal Code in Indonesia. Heir is a person or party entitled to file a petition for judicial review in criminal cases, as stipulated in Article 263, paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, "of decision that has permanent legal force, except for judgment of acquittal or absolute discharge, felon or his heirs may file a petition for judicial review to Supreme Court. Referring to the provisions, a judicial review, is a legal action, which is provided against the court ruling, which has permanent legal force (inkracht van gewijsde), related to criminal prosecution. The provision is imprecise since it does not set the meaning scope of the term "heir"; and in the implementation it results in problems related to its interpretation. Problems arise as the panel of judges of the Supreme Court in the Decision Number 97PK/Pid/Sus/2012 accepted a petition

for case review appeal filed by the wife of felon, ST, and regarded her as his beneficiary. The issue is whether the wife of a felon who are still alive can be considered as his heir? This analysis is discussing the legal interpretation of Supreme Court judges employed in accepting the petition for case review filed by the wife of ST in regard to the prevailing jurisdictions and doctrines. (Ramiyanto) Keywords: legal interpretation, heir, case review appeal.	analysis applies normative legal research method by using secondary data sources. The research data is in the form of primary legal materials, secondary and tertiary. The data are studied through qualitative-legal research. From the aspect of criminal law, forensic post-mortem examination is used to determine the cause of death of the victim that relates to criminal liability. (Y. A. Triana Ohoiwutun) Keywords: premeditated murder, post-mortem forensic examination, visum et repertum, criminal liability.
UDC 343.25 Ohoiwutun YAT (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember) The Urgency of Forensic Post-Mortem Examination to Determination of Criminal Liability in the Premeditated Murder Crime An Analysis of Court Decision Number 79/Pid.B/2013/PN.BGR (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(1), 73-92 Court Decision Number 79/Pid.B/2012/PN.BGR prosecutes a criminal case of premeditated murder committed jointly by four convicts. Crimes of murder as a material offense, prohibiting a result of the act of taking the life of others, therefore, a causal connection between the actions of each convict that caused the death of the victim shall be proved. However, visum et repertum as the documentary evidence in the case investigation of the Court Decision Number 79/Pid.B/2012/PN.BGR cannot reveal the cause of death since the forensic post-mortem examination was not carried out. Causal connection between the act and result in material offense correlates with criminal liability. Forensic post-mortem examination of murder crime jointly committed is a requirement of “conditio sine qua non” in determining criminal liability. The forensic post-mortem examination to acquire visum et repertum is the emphasis of this analysis. This	UDC 343.352 Prahassacitta V (Fakultas Humaniora Jurusan Business Law, Universitas Bina Nusantara, Jakarta) Questioning the Criminal Liability of PT IM2 in the Corruption Case An Analysis of Court Decision Number 787 K/PID. SUS/2014 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(1), 93-112 Supreme Court Decision Number 787 K/PID. Sus/2014 issued a ruling on the corruption case of PT IM2 with additional penalty payment of compensation for criminal offense committed by Defendant IA, President Director of PT IM2, in violation of Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18, paragraph (1) and (3) of Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication in conjunction to Article 55 paragraph (1) item 1 of the Criminal Code. The corporate crime stemmed from the agreement between PT IM2 and PT I in an unlawful use of 2.1 GHz radio frequency band. How the system of corporate criminal liability in the case, especially in relation to the application of Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 is an interesting issue to question. Through a normative legal research by literature study it can be concluded that doctrine of identification is used to identify the defendant’s mens rea towards

corporation to ask for criminal liability either to the board or corporation. However, from historical interpretation, the application of Article 2 paragraph (1) is not appropriate in this case because the article is a *delicta propria*, which is specifically addressed to civil servants. At the end, the disclosure of corporate crime cases asking for criminal liability corporation should be encouraged by considering the most appropriate law that corresponds to criminal offenses committed.

(Vidya Prahassacitta)

Keywords: corporate crimes, corporate criminal liability, corruption.